

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian tentang perilaku birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo mencerminkan kondisi faktual atas ketidaknetralan birokrasi dalam hal ini ASN dalam setiap perhelatan demokrasi di tingkat nasional maupun lokal. Atas hal tersebut, Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini mencakup :

1. Perilaku birokrasi khususnya ASN yang berada di jajaran struktural dan fungsional khususnya guru berperilaku sosiologis dan psikologis dalam Pemilu, sementara ASN yang berada di jajaran fungsional khususnya tenaga kesehatan berperilaku rasional dalam menentukan pilihan politik. Secara keseluruhan perilaku birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo mencakup :
  - a. Perilaku sosiologis, dalam menentukan pilihan politik, ASN mempertimbangkan aspek pekerjaan sebagai birokrat, ketaatan dan kepatuhan terhadap kepala daerah, ikatan keluarga dan kerabat dekat serta afiliasi ASN dengan organisasi kemasyarakatan.
  - b. Perilaku psikologis, kecenderungan ASN dalam preferensi politiknya berdasarkan pada identifikasi partai yang berdasarkan pada refleksi atas kepercayaan terhadap partai politik dan pengalaman yang

didapatkan sebelum menjadi ASN serta keyakinan atas kemampuan calon berdasarkan refleksi kedekatan antara calon dengan ASN.

- c. Perilaku rasional, ASN yang berada dalam jajaran fungsional dalam hal ini tenaga kesehatan berperilaku rasional dalam menentukan pilihan politik yang berdasarkan pada visi dan misi serta isu program calon kandidat dibidang kesehatan. ASN lebih cenderung logis dan konsisten atas pilihan politiknya.
2. Terdapat beberapa faktor yang menentukan perilaku birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo, diantara faktor tersebut adalah :
    - a. Politisasi birokrasi melalui promosi dan penunjukan jabatan karir, mutasi dan pencopotan jabatan serta keterlibatan Birokrasi dalam kegiatan kampanye politik mempengaruhi perilaku birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo. Loyalitas dan kepatuhan terhadap kepala daerah beserta partai politiknya membuat ASN mudah untuk dipolitisir. Selain itu, terdapat keterlibatan ASN dalam kampanye politik baik dukungan materil dalam bentuk sumbangan maupun dukungan moril.
    - b. Mobilisasi pemilihan pada pelaksanaan Pemilu 2019 dalam bentuk Mobilisasi struktur dan Jejaring Birokrasi. Melalui OPD terkait, memobilisasi dukungan masyarakat, terutama kelompok tani yang mendapatkan bantuan bibit dan bantuan kebutuhan dasar lainnya menjelang pemungutan suara. Selain itu, mobilisasi ASN juga dilakukan

melalui acara kedinasan, baik yang dilakukan oleh bupati maupun kepala OPD pada setiap apel di dinas masing-masing tentang himbauan yang secara simbolik mengarah pada calon dan partai PDIP, serta yang terakhir adalah mobilisasi pada hari pemungutan suara di TPS. Bentuk mobilisasi yang berikut adalah melalui jejaring keluarga dan kerabat dekat ASN. Kedua bentuk mobilisasi tersebut efektif dalam menentukan perilaku birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo.

- c. Peran kepala daerah, peran kepala daerah sebagai faktor determinan dalam mempengaruhi perilaku birokrasi. Peran kepala daerah mendapatkan dukungan signifikan aparatur birokrasi di daerah. kepala daerah memiliki kontrol penuh terhadap struktur birokrasi dan ASN di daerah. Selain itu, posisi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki kewenangan terhadap keberadaan pejabat daerah maupun ASN. Kepala daerah juga memiliki keleluasaan dalam mengontrol sumber daya pemerintah daerah, melalui program penyaluran bibit dan kebutuhan pokok, serta prioritas pembangunan pada beberapa wilayah signifikan dalam mendapatkan dukungan calon dan partai PDIP.
3. Agar kecenderungan ASN netral secara politik dalam Pemilu, perlu adanya internalisasi perilaku pendindakan (Salbia) sebagai penguatan perilaku birokrasi menjelang Pemilu di Kabupaten Boalemo. Perilaku pendindakan (Salbia) cenderung mentengarai ASN yang berperilaku

berdasarkan pertimbangan sosiologis dan psikologis. Selain itu, Perilaku rasional ASN dalam Pemilu belum cukup dalam menengarai Independensi atau netralitas birokrasi pada pelaksanaan Pemilu, hal ini disebabkan perilaku rasional selain logis, konsisten juga terdapat inkonsistensi. Perilaku penindakan (Salbia) sebagai nilai falsafah adat Gorontalo yang perlu diinternalisasi melalui perilaku birokrasi dalam Pemilu antara lain :

- a) Kesetiaan dan kepatuhan, kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah tidaklah mutlak, oleh sebab itu ketika himbauan maupun perintah tidak sesuai dengan norma hukum adat maupun hukum normatif harus ditinggalkan oleh ASN.
- b) Konsistensi terhadap aturan, sebagai ASN harus patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku agar netralitas politiknya tetap terjaga
- c) Keteguhan pada prinsip, memilih berdasarkan pada pertimbangan sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain
- d) Kepemimpinan (Ta'uwa), tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk melegitimasi kepentingan politik sesuai dengan prinsip *datahu lo huntu huidu* (daratan menjunjung gunung).

## B. Saran

Berangkat dari kesimpulan di atas, maka saran atau rekomendasi dalam penelitian ini mencakup :

1. Untuk memberikan penguatan terhadap perilaku rasional birokrasi disaat Pemilu, Perlu adanya internalisasi nilai *salbia* dalam perilaku birokrasi di daerah. Melalui internalisasi nilai *salbia* akan membentuk sikap dan sifat ASN yang netral atau independen dalam Pemilu tanpa memihak. Oleh sebab itu, Perlu adanya sinkronisasi antara konsep birokrasi modern dengan konsep birokrasi tradisional sebagai bentuk tata nilai perilaku dan manajemen birokrasi pemerintahan daerah.
2. Perlu adanya sinkronisasi praktek administrasi publik yang berlandaskan pada ekologi administrasi agar semua daerah sedapat mungkin menginternalisasi nilai sosial budaya sesuai dengan karakteristik masyarakat di daerah
3. Agar birokrasi daerah netral atau independen dalam Pemilu, dipandang perlu untuk melihat atau menelaah kembali kewenangan kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang memiliki pengaruh terhadap netralitas birokrasi pada setiap Pemilu
4. Agar netralitas dan independensi ASN di saat Pemilu bisa tercapai, dibutuhkan penguatan kelembagaan terhadap Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terutama menyangkut dengan kedudukannya di daerah

serta memiliki kewenangan dalam memutuskan setiap perkara yang berkaitan dengan netralitas birokrasi dalam Pemilu

2. Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah atau pihak lainnya dapat mengadopsi prototipe transformasi Netralitas ASN Dalam Pemilu Melalui nilai *Salbia* agar dapat melahirkan perilaku birokrasi dalam hal ini ASN yang netral dan tidak berpihak kepada calon dan partai politik.
3. Untuk menginternalisasikan nilai salbia sebagai penguatan netralitas ASN dalam Pemilu, perlu agenda setting melalui dua strategi, yakni agenda jangka pendek adalah penguatan melalui modul prajabatan ASN dan jangka Panjang melalui penguatan kurikulum melalui agenda Pendidikan formal pada tingkat SD, SMP dan SMA hingga Perguruan Tinggi menyangkut dengan filosofi nilai-nilai salbia dalam pelajaran muatan lokal atau mulok.
4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang objek yang sama dalam penelitian ini, agar dapat menemukan formula atau model terutama menyangkut dengan wewenang pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) serta penguatan kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) termasuk kedudukannya di daerah serta wewenang penuh untuk mengadili ASN yang berperilaku tidak netral dalam Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas J. Rusdi. 2009. (TESIS) *Konflik Elit Dalam Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara 2007-2008*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik UGM
- Adhi Aswin, 2016. *Netralitas Birokrasi Pemerintah: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2008 (Era Orde Baru, Era Transisi, Dan Era Reformasi)*. Disertasi. Manajemen dan Kebijakan Publik. UGM
- A.G. Naue. 1971. Hubungan Adat Istiadat dengan Kebudayaan. Dalam Seminar Adat Gorontalo 1971
- Albrow Martin. 2012. *Birokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Almond, Gabriel dan Verba, Sydney. 1990. *Budaya Politik. Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Faried. 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ali Farid, Baharudin. 2014. *Ilmu Administrasi Dalam Pendekatan Hakikat Inti*. Bandung: Refika Aditama
- Amin, Basri: 2012. Islam, Budaya dan Lokalitas Gorontalo Jurnal Sejarah & Budaya "KURE", N0.07 Tahun VII/2012,
- Aminudin Suryana, "Perilaku Politik Indonesia." Jurnal Aspirasi 2 (Februari 2011)
- Amy Y.S. Rahayu, Wisnu Juwono. 2019. *Birokrasi dan Governance, Teori, Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anselm, Strauss dan Juliet Corbin. 2003. "Dasar-dasar Penelitian Kualitatif". Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Antunes, Rui. "*Theoretical models of voting behaviour*". *Exedra* 4 (2010) : 145-170. Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Coimbra. Published <http://exedra.esec.pt/docs/N4/10C>
- Apter David, 1985. *Pengantar Analisis Politik*. Jakarta: LP3ES
- Apriyanto, Joni. 2008. *Pencitraan Historiografi (Transformasi Birokrasi Tradisional dan Konflik Politik di Gorontalo Awal Abad XIX Sampai Abad XX*. Gorontalo: UNG Press
- Ardana, Mujiati, Sarathi. 2009. *Perilaku Keorganisasian Edisi 2* . Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arifin, Bambang Syamsul. 2015. *Psikologi Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia

- Arikunto Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Aswar Saifudin. 1998. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Atabik, Ahmad. 2014. *Telaah Pemikiran Al-Ghazali Tentang Filsafat*. Jurnal Fikrah, Vol. 2, No. 1, Juni 2014
- Azwar, S. 2011. *Sikap dan Perilaku. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya (Edisi 2)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Baruadi, Karmin. 2012. *Sendi Adat Dan Eksistensi Sastra; Pengaruh Islam Dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo*. Jurnal El Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012
- Basuki, Johan. 2019. *Administrasi Publik. Telaah Teoritis dan Empiris*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Beetham David. 1990. *Birokrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Blau, M Peter dan M. W. Meyer. 1987. *Birokrasi Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Gary Rachman Jusuf, UI-Press, Jakarta
- Botomore. 2006. *Elite dan Masyarakat*. Jakarta : Akbar Tanjung Institut
- Botutihe, Medi & Daulima. 2003. *Tata Upacara Adat Gorontalo*
- BPost, 16 Desember 2021. 1.362 ASN diJatuhi Hukuman Disiplin
- Budiarjo, Miriam. 2010 *“Dasar-Dasar Ilmu politik”*. (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan keempat
- Czudnowski Moshe, 1976. *Comparing Political Behavior*. London: Sage Publication, Inc.
- Daniarsyah Dida, (Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi) *“Bureaucratic Political And Neutrality Of Bureaucracy In Indonesia”*. Vol, 2. No, 2. Desember 2015
- Dean, Croft. 2009. *Reason and choice: A Conceptual Study of Consumer Decision Making Electoral Behavior*. *Journal of Political Marketing*. Routledge Taylor & Francis Group
- Diana Bambang Agus, 2020. *Pengaruh Politik Dalam Birokrasi Pemerintahan*. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*. Volume 2. No. (1)
- Dungga. 1971. *Bandingan Terhadap Prasaran Seminar Adat Istiadat Uduluwo Lou Limo Lo Pohala*. Dalam Seminar Adat Gorontalo 1971.



- Dwiyanto, Agus. 2015. Reformasi Birokrasi Kontekstual. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Edward Aspinall, Ward Berenschot. 2019. *Democracy For Sale*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Fahmi Irham. (2018). Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus. Bandung. Alfabeta
- Farazmand Ali. 2009. *Bureaucracy and Administration*. New York: Taylor & Francis Group.
- Franglin Charles H, 1992. *Measurement and the Dynamic of Party Identification*, dalam *Political Behavior*, Vol 11, No 3. 1992
- Franklin N. Mark, 1995. *Voting Behavior, dalam seymour Martin Lipset (ed), The ensiklopedia of democracy*, Volume IV (Washington DC. A Division of Congressional quarterly Inc
- Firmanzah, 2012, Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas, edisi revisi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firnas M. Adian, 2011a. Evaluasi Reformasi Birokrasi : Masalah Politisasi Birokrasi Dalam Politik Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. 5, No.(2)*
- Firnas, M. Adian. 2016b. Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Review Politik* Volume 06, No. 01 Juni 2016 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Gabriel Almond dan Verba. 1990. Budaya Politik Tingkah laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara . Jakarta: Bumi Aksara
- Gaebler, Osborne David, 1993. *Reinventing Government*, New York: Plume,
- Gaffar Affan. 1992a. *Javanese Voters: A Case Study Of Election Under Hegemonic Party System*; (Disertasi, *The Ohio State University*.1998) Yogyakarta : Gama Pers
- Gaffar Affan. 2004b. Politik Indonesia (Transisi Menuju Demokrasi) Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Gehlbachch,Simpser. 2014. Electoral Manipulation as Bureaucratic Control. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1111/ajps.12122>
- George Sorensen,2003. "Demokrasi dan Demokratisasi".Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Gie Liang. 1992. Administrasi Perkantoran Modern, Edisi ke-4. Yogyakarta : Liberty

- Greenstein, 1969. *Personal and Politics*. Chicago: Morkham Publishing
- Gitosudarmo, Sudita, (2016). *Perilaku keorganisasian*. Yogyakarta. BPFY-  
Yogyakarta
- Guy, Benveniste, 1997. *Birokrasi*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada
- Gyung-Ho Jeong.2016. ***American Journal of Political Science*** Electoral Rules and Bureaucratic Effectiveness. *Journal Politics & Policy*. <https://doi.org/10.1111/polp.12184>
- Haga B.J, 1981. *Lima Pohalaa (Susunan Masyarakat, Hukum Adat dan Kebijakan Pemerintahan di Gorontalo)*. Jakarta :Djambatan Kerjasama Inkultra Foundation INC.
- Halaevy Etzioni 2011, *Demokrasi & Birokrasi Sebuah Dilema Politik*, Yogyakarta, Matapena Istititut
- Hamali, Budi Hastuti. 2019. *Pemahaman Praktis Administrasi. Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamim Udin 2006. *Perilaku memilih Etnis Gorontalo Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Tidore Kepulauan*. (Tesis Program Studi Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana UGM)
- Harjanto. Niko, 2011, *Politik Kekkerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia*, Artikel. Analisis CSIS.
- Harrison Lisa, 2007. *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta : Kencana prenatal Media Group.
- Hasan Aswar, 2017. *Demokratisasi Birokrasi Sebuah Studi Perilaku Birokrasi dalam Pelayanan Informasi Publik di Pemkot Makassar (Disertasi Program Pascasarjana Administrasi Publik UNHAS Makassar)*
- Henry Bland.1975. *Public Administration-Wither?*. Canberra, The Royal Institute of Public Administration.
- Henry Nicholas. 1975. *Paradigms Of Public Administration*. *American Society For Public Administration*. Vol. 35, No. 4 (Jul. - Aug., 1975)
- Hetrington J. Marc, 1996. *The Media's Role in Flaming Voters, National Economic Evaluation in 1992*, dalam *American Journal of Political Science*, Vol 40, No,2, 1996
- Huberman & Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

- Joan Nelson & Samuel P. Huntington. 1994. "Partisipasi Politik di Negara Berkembang". Jakarta: Rineka Cipta
- John Harriss, Kristian Stokke, Olle Tornquist 2004, Politisasi Demokrasi (Politik Lokal Baru), Jakarta: Demos
- Jones, Bradbury, Bputtler. 2016. Pengantar Teori-Teori Sosial. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Kaluku, Kuno. 1965a. Lukisan Seni Kebudayaan Limo Lo Pohalaa Gorontalo. Jilid I. Gorontalo Rumah Sangkar Gelatik.
- Kaluku Kuno. 1971b. Sejarah Adat Istiadat Gorontalo dan Agama Islam. Panitia Seminar Adat Gorontalo Tahun 1971
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama,
- Kamuli, Sukarman, 2012. Birokrasi Di Negara Sedang Berkembang (Telaah Atas Kajian Ferrel Heady). Jurnal INOVASI Volume 9, No.2, Juni 2012
- Kamuli, Fahmi. 2020. Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penentuan Tempat Kerja Akibat Mutasi Aparatur Sipil Negara" (Studi Kasus Di Kabupaten Boalemo) Tesis S2 Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
- Kantaprawira, Rusadi, 2006, Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar, Jakarta, Sinar Baru Algensindo
- Kartiwa, 2007. *Good Local Governance : Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Akuntabel*, Jurnal Ilmiah Wacana Kerja, Vol. 10
- Kavanagh Deenis, 1983. *Political Science and Political Behavior. London : Keorge Allen and Invin*
- Koentjaraningrat. 2000. Pengantar Antropologi. Jakarta : Aneka Cipta.
- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), 2018. Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Jakarta : KASN
- Kompas 16 Maret 2021. Problem Netralitas Bisa Lebih Berat. 3
- Lay Cornelis, 1998. Birokrasi Indonesia. Perspektif Pemerintahan, JIP FISIPOL UGM
- Ladini, Yuwanto dan 2019. Perilaku Memilih Pemegang Kartu Tani pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 Kabupaten Semarang. *Journal of Governance dan political social. Vol 7, No. (2)*
- Lau, R. Richard, et. al (2006) *How Voters Decide. USA: Cambridge University.*

- Lihawa, Dkk. 2001. Kamus Istilah Adat Gorontalo. Gorontalo : UNG Press
- Littlejohn, Stephen W,. 2002. *Theories of Human Communication (edisi ketujuh)*. Belmont: Thomson Learning.
- Lofland, John & Lyn.H.Lofland. (1984). *Analyzing Social Settings*. California: Wadsworth Publishing Company.
- M. Asfar, Pemilu 2004. dan Perilaku Memilih 1955-2004. Surabaya: Pustaka Utama
- Madjowa Verrianto. 2015. Pemilu Gorontalo 1955-2014. Depok: Banana dan Perludem
- Moleong Lexy 2007a. Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Moleong Lexy .2008b. Penelitian kualitatif. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mahendra, Oka. 2005. Pilkada Di Tengah Konflik Horizontal. Jakarta : Millenium Publisher
- Mahmud Ramli dkk. 2020. *Strengthening Local Democracy (Orientation Study of Political Culture of Coastal Communities in Dulupi District, Boalemo Regency)*. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. ISSN 2364-5369 Volume 7, Issue 7 August, 2020 Pages: 758-765
- Martini Rina . Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. Jurnal Ilmu Sosial Vol. 14. No. 1 Juli 2015
- Meier, Kenneth, J. dan Laurence J. O'Toole, Jr, 2006. *Bureaucracy In A Democratic State: A Governance Perspective*. USA: The John Hopkins University Press.
- Meyer, Blau. 2000. Birokrasi Dalam Masyarakat Modern. Jakarta-Indonesia. Prestasi Pustakarya
- Miller & Martin Harrop. 1987. *Elections And Voters a Comparative Introduction*. MacMillan Press,
- Mudiarta Untung 2018. Politisasi Pelayanan Publik Perspektif Komparatif Beberapa Negara (Mencari Cara Mengontrol Birokrasi) Jurnal Politik & Pemerintahan - Vol.2, No.2, Desember 2018
- Muhammad Hakiki. 2011. Pemikiran Kalam Syaikh Muhammad Sanusi. Jurnal TAPIs Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011
- Mustafa, Delly. 2018. Birokrasi Pemerintahan. Bandung : Alfa Beta
- Mosca.G. (1993). *The Ruling Class*. New York. McGraw Hill

- Moustakas Clark, 1994. "*Phenomenological Research Methods*", (California: SAGE Publications,
- Moon David, 1992. *The determinants of turnout in presidential elections : an integrative model accounting for information, in the political behavior.* Vol.14. No.2.
- Ndraha, Taliziduhu 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia.* Jakarta: Bina Aksara
- Neil Garston. 1993. *Bureaucracy: three paradigms.* Springer Science+Business Media, LLC
- Nimmo. 2001. *Komunikasi Politik*, Bandung : Rosda Karya
- Niode, Mohi. 2003. *Aabad Besar Gorontalo.* Gorontalo : *The Presnas Centre*
- Niode, Alim. 2007. *Gorontalo Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial.* Jakarta : Pustaka Indonesia Press.
- Pamudji S. 1993. *Ekologi Administrasi Negara*,. Jakarta : Bina Aksara.
- Paskarina Caroline. 2015. *Menundukkan Birokrasi: Melacak Pertarungan Kuasa Dibalik Wacana Reformasi Birokrasi . Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.1 No.(1)*
- Pasolong Harbani. 2008a. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Pasolong Harbani. 2019b. *Teori Administrasi Publik.* Bandung : Alfabeta
- Pasolong Harbani. 2015c. *Kepemimpinan Birokrasi.* Bandung : Alfabeta
- Pateda, Mansur. 1977. *Kamus Bahasa Gorontalo-Indonesia.* Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Perdana Gema. 2019. *Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization . Jurnal Negara Hukum: Vol. 10, No. (1)*
- Prasojo Eko, Dkk. 2006. "Mengurai Benang Kusut Birokrasi" Upaya Memperbaiki Centang Perenang Rekrutmen PNS. Depok, Piramedia
- Porter, Rogowski. 2018. *Partisanship, Bureaucratic Responsiveness, and Election Administration: Evidence from a Field Experiment. Journal of Public Administration Research And Theory, 2018, 602–617 doi:10.1093/jopart/muy025*
- Rakhmawanto. 2017. *Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah.* Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. III Nomor (1)

- Ramadhanti Rika. 2018. Politik Dan Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Trias Politika, Vol 2. No.(1)*
- Riggs, Fred.W, 1964. *Administration in Developing Countries, The Theory of Prismatic Society, Houghton Mifflin Company, Boston*
- Riggs, Fred. W (ed). 1996. Administrasi Pembangunan: Batas-Batas Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi. Rajawali Press. Jakarta.
- Richard & Wiisberg, 1984. *Controversies of Voting Behavior, (Washington DC. A Division of Congressional quarterly Inc,*
- Robert Dahl, Perihal Demokrasi 2001, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Robert Michels. 1984. Partai Politik, Kecenderungan Oligarki dalam Birokrasi. Jakarta : Rajawali
- Robbins Stephen, Judge, 2015. Perilaku organisasi, *organization behavior*. Salemba Empat.
- Ruslan. 2008. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ruslan Rosady, 2013. Kiat dan Strategi Kampanye *Public Relations*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Saefullah, Asep Djadja, 1995. Mobilitas Penduduk Desa-Kota: Jembatan Modernisasi Pedesaan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. Bandung: Universitas Padjadjaran
- Santoso Budi, 2012. Definisi Pekerjaan. <https://inisantoso.wordpress.com/2012/09/25/definisi-pekerjaan/> diakses : 7 Juli 2021 Pukul. 16.00 Wita
- Santoso Priyo Budi, 2009 Gagasan Perubahan Sistem Pemilu Dan Rekrutmen Parpol: *Governance Reform* Di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik Yang Demokratis Dan Birokrasi Yang Profesional. Yogyakarta. Gava Media-MAP UGm
- Santosa Pandji. 2017. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi *Good Governance*. Bandung : Refika Aditama
- Sarnawa Bagus, 2018. Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Media Hukum. Vol. 25 No(.2)*
- Sarundajang, H. 2012. Birokrasi dalam Otonomi Daerah “Upaya Mengatasi Kegagalan”. Kata Penerbit: Jakarta.
- Sarker, Bingxin, Sultana & Prodhan. 2017. *Problems And Challenges Of Public Administration In Bangladesh: Pathway To Sustainable Development. International Journal Of Public Administration And Policy Research*

Vol. 3(1), pp. 016-025, April, 2017. © www.premier publishers.org,  
ISSN: 3219-2781

- Sastroatmodjo Sudijono, 1995, Perilaku Politik, IKIP (Semarang Press).
- Setiyono, B. (2012). Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi. Bandung: Nuansa.
- Setiawan, Ifan. 2014. Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Sheik, Akhter. 2014. *Determinants of Voting Behavior in India: Theoretical Perspective. Public Policy and Administration Research www.iiste.org ISSN 2224-5731(Paper) ISSN 2225-0972(Online) Vol.4, No.8, 2014*
- Siagian, Sondang P. 1995a. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siagian Sondang P., 200b2. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Simamora Birman, 2018. Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018. Jurnal Hukum Republica, Vol. 17, No. (2)
- Soekanto Soerjono, 2013. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudirman. 2009. Disertasi Netralitas birokrasi dalam politik: Studi kasus tentang netralitas PNS dalam pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan tahun 2007 dan Banten tahun 2006. Disertasi. S3 Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Sugiharto Imawan, 2019. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Volume 18, No. (1),
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian kuantitatif kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Surbakti Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Surie. H. G. (diterj. Samekto), 1987. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Gramedia
- Suryanjar Enny, Catatan Kritis Terhadap Politisasi Birokrasi Dalam Pemilu. E-Jurnal BKN Vol No 1 Juni (2009)
- Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS

- Syafiie Kencana, Welasari. 2017. Ilmu Administrasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Tahir, Arifin, 2014a. Perilaku Organisasi. Yogyakarta : Deepublish
- Tahir, Arifin, 2011b. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : Pustaka Indonesia Press
- Tim perumus Kerjasama Pemda Kabupaten Gorontalo dengan Forum Kajian Islam AL-Kautsar Gorontalo, 2007. Tentang Tata Upacara Adat Gorontalo..
- Thoha Miftah, 2002a. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Thoha Miftah, 2012b. "Birokrasi Pemerintahan dan Kekuasaan di Indonesia". Yogyakarta, Matapena Institute
- Thoha Miftah, 2014c. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Thoha Miftah, 2014d. Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia, Yogyakarta : Kencana
- Thoha Miftah, 2016e. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Thoha Miftah, 2019f. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada. Edisi ke-25
- Thoha Miftah, 2020g. Perspektif Perilaku Birokrasi : Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Torang Syamsir, 2014. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi) : Bandung: Alfabeta
- Toselanika. 2009. Gagasan Perubahan Sistem Pemilu Dan Rekrutmen Parpol: Governance Reform Di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik Yang Demokratis Dan Birokrasi Yang Profesional. Yogyakarta. Gava Media-MAP UGM
- Tomagola, Amal. 2006. Republik Kapling. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Resist Book
- Ummati Khoirul, 2002. Perilaku Politik Kiai, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset,
- Urbaningrum Anas 2009 melanjutkan penataan demokrasi kita: governance reform di indonesia: mencari arah kelembagaan politik yang demokratis dan birokrasi yang profesional. Yogyakarta. Gava Media-MAP UGM



- Utami Hana, 2010. Teori dan pengukuran Pengetahuan, sikap dan Perilaku Manusia. Yogyakarta : Nuha Medika
- Utomo Said, Bejo Untung. 2019. Laporan Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN. Jakarta. KASN
- Wahyudi Lutfi. Politisasi Birokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Jurnal Paradigma, Vol. 7 No. 3, December 2018
- Warsito Utomo, 2005, Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal Bagaimana Semangat Kompabilitas menjadi Budaya Birokrasi, Yogyakarta : UGM
- Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Edisi ketiga. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Wen-Shien Peng. 2008. *A Critique Of Fred W. Riggs' Ecology Of Public Administration. Public Administration Quarterly. Vol. 32, No. 4. (WINTER 2008), pp. 528-548 (21 pages). Published By: SPAEF*
- Winardi. 2004. Manajemen Perilaku Organisasi (edisi revisi). Jakarta : Kencana
- William Liddle, Mujani & Ambardi, 2012. Kuasa Rakyat: Analisa tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru (Jakarta: Mizan Media Utama
- Wisura Gde. 2008. Demokratisasi Dan Problem Netralitas Birokrasi Di Indonesia Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Vol. 2 No. 2 November 2008
- Van Klinken, Gerry. 2007. Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Yudiatmaja Wayu Eko, 2015. Politisasi Birokrasi: Pola Hubungan Politik dan Birokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) No.(1)
- Zuhro Siti. 2019. Democracy And The 2019 Election. Jurnal Penelitian Politik, Volume 16 No.(1)
- Zuhro Siti, 14 Maret 2021. Etika Politik dan Partai Politik (Online), <https://www.youtube.com/watch?v=GY4L-jclpYg>, Diakses 14 Maret 2021
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat.
- Permendagri No. 58 Tahun 2019 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan BKN No 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
- Dokumen Seminar Adat Gorontalo Tahun 1971
- Laporan Hasil Riset Pemetaan Stabilitas Politik Menjelang Pemilu di Kabupaten Boalemo 2019. Kerjasama Kesbangpol Kabupaten Boalemo dengan Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan (IHK) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo